

Perhitungan Data Penelitian Menggunakan SPSS 12.0 For Windows

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
rencana	60	917.5000	118.92321	733.00	1282.00
realisasi	60	3081.4667	464.08161	2425.00	3913.00

Test Statistics

	rencana	realisasi
Chi-Square(a)	2.700	2.700
df	56	56
Asymp. Sig.	1.000	1.000

a. 57 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 1.1.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR KEP - 443/PJ./2000

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, STRATEGI, DAN NILAI ACUAN DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan citra, kerja, dan kinerja Direktorat Jenderal Pajak menuju kearah profesionalisme, dan menunjang terciptanya Pemerintahan yang baik (good governance), perlu adanya penyatuan arah dan pandangan bagi segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional di seluruh bidang tugas di seluruh unit organisasi Direktorat Jenderal Pajak secara terpadu;
- b. Bahwa untuk itu perlu adanya pernyataan visi, misi, strategi, dan nilai acuan Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi pedoman mengenai arah yang dituju, beban tanggung jawab, strategi pencapaiannya serta nilai-nilai sikap dan perilaku aparat;
- c. Bahwa visi, misi, strategi, dan nilai acuan Direktorat Jenderal Pajak tersebut perlu ditegakkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG VISI, MISI, STRATEGI, DAN NILAI
ACUAN DIREKTORAT

JENDERAL PAJAK.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak;
- b. Misi adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan, dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya dimana Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan berinteraksi;
- c. Strategi adalah arah atau jalan yang akan ditempuh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan misinya menuju pencapaian visi;
- d. Nilai Acuan adalah nilai-nilai yang dianut dan diyakini akan dapat menjadi landasan pembentukan sikap dan perilaku baik unit organisasi maupun individu aparat yang sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 2

Visi Direktorat Jenderal Pajak :

Menjadi Model Pelayanan Masyarakat Yang Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan Kelas Dunia. Yang Dipercaya dan Dibanggakan Masyarakat.

Pasal 3

Misi Direktorat Jenderal Pajak :

- a. Misi Fiskal : Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi;
- b. Misi Ekonomi : Mendukung kebijaksanaan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan perpajakan yang minimizing distortion;
- c. Misi Politik : Mendukung proses demokratisasi bangsa;
- d. Misi Kelembagaan : Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan yang mutakhir.

Pasal 4

Strategi Direktorat Jenderal Pajak :

- a. Misi Fiskal :

1. Tingkatkan penguasaan atas subjek dan objek pajak;
 2. Penyempurnaan perundang-undangan perpajakan;
 3. Tingkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat;
 4. Tingkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat;
- b. Misi Ekonomi :
1. Berkoordinasi dengan instansi terkait merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan perpajakan yang mendukung pengembangan dan perbaikan keunggulan kompetitif Indonesia;
 2. Berkoordinasi dengan instansi terkait mengembangkan kebijaksanaan perpajakan yang mendukung pengembangan usaha kelompok ekonomi kecil;
 3. Berkoordinasi dengan instansi terkait mengembangkan kebijaksanaan perpajakan yang kondusif dan merangsang investor;
- c. Misi Politik :
1. Meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah;
 2. Membantu penyempurnaan perangkat pengelolaan pendapatan daerah;
 3. Meningkatkan peranan PPh Orang Pribadi, PBB dan BPHTB dalam mendukung pengembangan APBD;
- d. Misi Kelembagaan :
1. Kembangkan organisasi Direktorat Jenderal Pajak sesuai visi dan mendukung pelaksanaan misi Direktorat Jenderal Pajak;
 2. Kembangkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Inovatif dan mampu mendukung pelaksanaan misi dan strategi menuju pencapaian visi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan nilai-nilai acuan;
 3. Tingkatkan secara berkelanjutan kinerja unit kantor;
 4. Mempurnakan layout kantor untuk memfasilitasi proses pembelajaran, peningkatan efisiensi proses internal dan optimalisasi pelayanan publik;
 5. Peningkatan/modernisasi sarana dan prasarana kerja;

Pasal 5

Nilai-nilai Acuan :

- a. Profesionalisme yang meliputi integritas, disiplin, dan kompetensi;
- b. Transparansi;

- c. Akuntabilitas;
- d. Meritokrasi;
- e. Kemandirian;
- f. Pelayanan Prima;
- g. Pembelajaran dan Pemberdayaan.

Pasal 6

Petunjuk-petunjuk lebih lanjut mengenai koordinasi dan pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Oktober 2000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

tttd

MACHFUD SIDIK

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
rencana	60	917.5000	118.92321	733.00	1282.00
realisasi	60	3081.4667	464.08161	2425.00	3913.00

rencana

	Observed N	Expected N	Residual
733.00	1	1.1	-.1
741.00	1	1.1	-.1
760.00	1	1.1	-.1
785.00	1	1.1	-.1
793.00	1	1.1	-.1
794.00	1	1.1	-.1
795.00	1	1.1	-.1
800.00	1	1.1	-.1
804.00	1	1.1	-.1
812.00	1	1.1	-.1
816.00	1	1.1	-.1
820.00	1	1.1	-.1
825.00	1	1.1	-.1
826.00	1	1.1	-.1
828.00	1	1.1	-.1
831.00	1	1.1	-.1
832.00	1	1.1	-.1
837.00	1	1.1	-.1
845.00	1	1.1	-.1
852.00	1	1.1	-.1
853.00	1	1.1	-.1
856.00	2	1.1	.9
862.00	1	1.1	-.1
866.00	2	1.1	.9
875.00	1	1.1	-.1
895.00	1	1.1	-.1
896.00	1	1.1	-.1
903.00	1	1.1	-.1
905.00	1	1.1	-.1
912.00	1	1.1	-.1
918.00	1	1.1	-.1
921.00	1	1.1	-.1
924.00	1	1.1	-.1
929.00	1	1.1	-.1
930.00	2	1.1	.9
934.00	1	1.1	-.1
936.00	1	1.1	-.1
943.00	1	1.1	-.1
948.00	1	1.1	-.1

961.00	1	1.1	-.1
964.00	1	1.1	-.1
967.00	1	1.1	-.1
981.00	1	1.1	-.1
985.00	1	1.1	-.1
1002.00	1	1.1	-.1
1003.00	1	1.1	-.1
1004.00	1	1.1	-.1
1015.00	1	1.1	-.1
1028.00	1	1.1	-.1
1035.00	1	1.1	-.1
1046.00	1	1.1	-.1
1071.00	1	1.1	-.1
1087.00	1	1.1	-.1
1135.00	1	1.1	-.1
1225.00	1	1.1	-.1
1272.00	1	1.1	-.1
1282.00	1	1.1	-.1
Total	60		

realisasi

	Observed N	Expected N	Residual
2425.00	1	1.1	-.1
2437.00	1	1.1	-.1
2451.00	1	1.1	-.1
2466.00	1	1.1	-.1
2490.00	1	1.1	-.1
2506.00	1	1.1	-.1
2523.00	1	1.1	-.1
2538.00	1	1.1	-.1
2561.00	1	1.1	-.1
2573.00	1	1.1	-.1
2585.00	1	1.1	-.1
2606.00	1	1.1	-.1
2629.00	1	1.1	-.1
2656.00	1	1.1	-.1
2678.00	1	1.1	-.1
2695.00	1	1.1	-.1
2716.00	1	1.1	-.1
2737.00	1	1.1	-.1
2752.00	1	1.1	-.1
2774.00	1	1.1	-.1
2789.00	1	1.1	-.1
2811.00	1	1.1	-.1
2823.00	1	1.1	-.1
2838.00	1	1.1	-.1

2852.00	1	1.1	-.1
2875.00	1	1.1	-.1
2896.00	1	1.1	-.1
2922.00	1	1.1	-.1
2948.00	1	1.1	-.1
2968.00	1	1.1	-.1
2989.00	1	1.1	-.1
3005.00	1	1.1	-.1
3038.00	1	1.1	-.1
3095.00	1	1.1	-.1
3119.00	1	1.1	-.1
3153.00	1	1.1	-.1
3180.00	1	1.1	-.1
3220.00	1	1.1	-.1
3270.00	1	1.1	-.1
3286.00	1	1.1	-.1
3367.00	1	1.1	-.1
3392.00	1	1.1	-.1
3426.00	1	1.1	-.1
3446.00	1	1.1	-.1
3478.00	1	1.1	-.1
3499.00	1	1.1	-.1
3555.00	1	1.1	-.1
3593.00	1	1.1	-.1
3639.00	1	1.1	-.1
3672.00	1	1.1	-.1
3707.00	2	1.1	.9
3735.00	2	1.1	.9
3796.00	2	1.1	.9
3818.00	1	1.1	-.1
3851.00	1	1.1	-.1
3888.00	1	1.1	-.1
3913.00	1	1.1	-.1
Total	60		

Test Statistics

	rencana	realisasi
Chi-Square(a)	2.700	2.700
df	56	56
Asymp. Sig.	1.000	1.000

a. 57 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 1.1.

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
rencana	60	917.5000	118.92321	733.00	1282.00

rencana

	Observed N	Expected N	Residual
733.00	1	1.1	-.1
741.00	1	1.1	-.1
760.00	1	1.1	-.1
785.00	1	1.1	-.1
793.00	1	1.1	-.1
794.00	1	1.1	-.1
795.00	1	1.1	-.1
800.00	1	1.1	-.1
804.00	1	1.1	-.1
812.00	1	1.1	-.1
816.00	1	1.1	-.1
820.00	1	1.1	-.1
825.00	1	1.1	-.1
826.00	1	1.1	-.1
828.00	1	1.1	-.1
831.00	1	1.1	-.1
832.00	1	1.1	-.1
837.00	1	1.1	-.1
845.00	1	1.1	-.1
852.00	1	1.1	-.1
853.00	1	1.1	-.1
856.00	2	1.1	.9
862.00	1	1.1	-.1
866.00	2	1.1	.9
875.00	1	1.1	-.1
895.00	1	1.1	-.1
896.00	1	1.1	-.1
903.00	1	1.1	-.1
905.00	1	1.1	-.1
912.00	1	1.1	-.1
918.00	1	1.1	-.1
921.00	1	1.1	-.1
924.00	1	1.1	-.1
929.00	1	1.1	-.1
930.00	2	1.1	.9
934.00	1	1.1	-.1
936.00	1	1.1	-.1
943.00	1	1.1	-.1
948.00	1	1.1	-.1
961.00	1	1.1	-.1

964.00	1	1.1	-.1
967.00	1	1.1	-.1
981.00	1	1.1	-.1
985.00	1	1.1	-.1
1002.00	1	1.1	-.1
1003.00	1	1.1	-.1
1004.00	1	1.1	-.1
1015.00	1	1.1	-.1
1028.00	1	1.1	-.1
1035.00	1	1.1	-.1
1046.00	1	1.1	-.1
1071.00	1	1.1	-.1
1087.00	1	1.1	-.1
1135.00	1	1.1	-.1
1225.00	1	1.1	-.1
1272.00	1	1.1	-.1
1282.00	1	1.1	-.1
Total	60		

Test Statistics

	rencana
Chi-Square(a)	2.700
df	56
Asymp. Sig.	1.000

a. 57 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 1.1.

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
realisasi	60	3081.4667	464.08161	2425.00	3913.00

realisasi

	Observed N	Expected N	Residual
2425.00	1	1.1	-.1
2437.00	1	1.1	-.1
2451.00	1	1.1	-.1
2466.00	1	1.1	-.1
2490.00	1	1.1	-.1
2506.00	1	1.1	-.1
2523.00	1	1.1	-.1
2538.00	1	1.1	-.1
2561.00	1	1.1	-.1
2573.00	1	1.1	-.1
2585.00	1	1.1	-.1
2606.00	1	1.1	-.1
2629.00	1	1.1	-.1

2656.00	1	1.1	-1
2678.00	1	1.1	-1
2695.00	1	1.1	-1
2716.00	1	1.1	-1
2737.00	1	1.1	-1
2752.00	1	1.1	-1
2774.00	1	1.1	-1
2789.00	1	1.1	-1
2811.00	1	1.1	-1
2823.00	1	1.1	-1
2838.00	1	1.1	-1
2852.00	1	1.1	-1
2875.00	1	1.1	-1
2896.00	1	1.1	-1
2922.00	1	1.1	-1
2948.00	1	1.1	-1
2968.00	1	1.1	-1
2989.00	1	1.1	-1
3005.00	1	1.1	-1
3038.00	1	1.1	-1
3095.00	1	1.1	-1
3119.00	1	1.1	-1
3153.00	1	1.1	-1
3180.00	1	1.1	-1
3220.00	1	1.1	-1
3270.00	1	1.1	-1
3286.00	1	1.1	-1
3367.00	1	1.1	-1
3392.00	1	1.1	-1
3426.00	1	1.1	-1
3446.00	1	1.1	-1
3478.00	1	1.1	-1
3499.00	1	1.1	-1
3555.00	1	1.1	-1
3593.00	1	1.1	-1
3639.00	1	1.1	-1
3672.00	1	1.1	-1
3707.00	2	1.1	.9
3735.00	2	1.1	.9
3796.00	2	1.1	.9
3818.00	1	1.1	-1
3851.00	1	1.1	-1
3888.00	1	1.1	-1
3913.00	1	1.1	-1
Total	60		

Test Statistics

	realisasi
Chi-Square(a)	2.700
df	56
Asymp. Sig.	1.000

a. 57 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 1.1.



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TASIKMALAYA**

Jalan Sutisna Senjaya No. 155
Tasikmalaya

Telepon : 0265 - 331851
Faksimile : 0265 - 331852

PEMBERITAHUAN

Sehubungan dengan UU RI No. 28 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku tmt 1 Januari 2008, maka perlu kami informasikan perubahan-perubahan yang mendasar :

No.	Uraian	Aturan Lama	Aturan Baru
1.	Jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan	3 bulan sejak akhir tahun pajak	4 bulan sejak akhir tahun pajak
2.	Denda keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT	a. SPT Masa Rp. 50.000,- b. SPT Tahunan Rp. 100.000,-	a. SPT Tahunan PPh OP Rp. 100.000,- b. SPT Tahunan PPh Badan Rp. 1.000.000,- c. SPT Masa PPN Rp. 500.000,- d. SPT Masa Lainnya Rp. 100.000,-
3.	Sanksi Administrasi	Tidak diatur	Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan Negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200 % dari pajak yang kurang dibayar yang diketahui pada saat pemeriksaan/penelitian.
4.	Pembayaran pajak	Kekurangan pajak berdasarkan SPT Tahunan (PPH Pasal 29) dibayar paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak	Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan (PPH Pasal 29) paling lambat sebelum SPT disampaikan (Pembayaran setelah jatuh tempo pelaporan dikenai sanksi bunga)

Kiranya Wajib Pajak dapat mengetahui perubahan tersebut sehingga dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku, apabila masih kurang jelas dipersilahkan menghubungi Account Representative (AR) yang bersangkutan.

Demikian untuk mendapat perhatiannya.

Tasikmalaya, 19 November 2007
Pjs. Kepala Kantor

Ttd.

Rusman Manik
NIP. 060061983



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI / BADAN**

Nomor :

Tahun Pajak :

Tanggal Penerbitan :

Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 13 atau 17B Undang-undang No. 9 Tahun 1994 jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan dan / atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan :

Nama :

NPWP :

II. Dari pemeriksaan dan / atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan Neto Rp. _____
2. Penghasilan Kena Pajak Rp. _____
3. Pajak Penghasilan yang terutang Rp. _____
4. Kredit Pajak :
 - a. Dipotong / dipungut oleh pihak lain :
 - a. 1. PPh Pasal 21 Rp. _____
 - a. 2. PPh Pasal 22 Rp. _____
 - a. 3. PPh Pasal 23 Rp. _____
 - a. 4. Lain-lain Rp. _____
 - a. 5. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4) Rp. _____
 - b. Dibayar sendiri :
 - b. 1. PPh Pasal 22 Rp. _____
 - b. 2. PPh Pasal 24 Rp. _____
 - b. 3. PPh Pasal 25 Rp. _____
 - b. 4. PPh Pasal 29 Rp. _____
 - b. 5. Lain-lain Rp. _____
 - b. 6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) Rp. _____
 - c. Diperhitungkan (Pokok) STP Rp. _____
 - d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a.5. + b.6. + c) Rp. _____
5. Pajak yang tidak / kurang dibayar (3 - 4.d) Rp. _____
6. Sanksi administrasi :
 - a. Rp. _____
 - b. Rp. _____
 - c. Rp. _____
 - d. Jumlah sanksi administrasi Rp. _____
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6.d) Rp. _____

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK



SURAT TAGIHAN PAJAK

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Nomor

Masa / Tahun Pajak :

Tanggal Penerbitan :

Tanggal

Tempo :

10 Tahun 1984 telah dilakukan penelitian dan / atau

I. Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No. 9 Tahun 1984 (p. Undang-undang pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan :

Nama

NPWP

II. Dari penelitian dan / atau pemeriksaan tersebut, di atas

penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Pajak / Pajak yang harus dibayar

2. Telah dibayar

3. Kurang dibayar

4. Sanksi Administrasi :

a.

b.

c.

sanksi administrasi

jumlah yang masih harus dibayar (3 + 4.a)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI / BADAN**

Nomor :

Tahun Pajak :

Tanggal Penerbitan :

I. Berdasarkan Pasal 17A Undang-undang No. 9 Tahun 1994 jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan :

Nama :

NPWP :

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan Neto (Rugi)		Rp.
2. Penghasilan Kena Pajak		Rp.
3. Pajak Penghasilan yang terutang		Rp.
4. Kredit Pajak :		
a. Dipotong / dipungut oleh pihak lain :		
a. 1. PPh Pasal 21		Rp.
a. 2. PPh Pasal 22		Rp.
a. 3. PPh Pasal 23		Rp.
a. 4. Lain-lain		Rp.
a. 5. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4)		Rp. _____
b. Dibayar sendiri :		
b. 1. PPh Pasal 22		Rp.
b. 2. PPh Pasal 24		Rp.
b. 3. PPh Pasal 25		Rp.
b. 4. PPh Pasal 29		Rp.
b. 5. Lain-lain		Rp.
b. 6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)		Rp. _____
c. Diperhitungkan (Pokok) STP		Rp. _____
d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a.5 + b.6 + c)		Rp. _____
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3 - 4.d)		Rp. NIHIL

III. Dengan demikian jumlah Pajak Penghasilan yang telah dibayar sendiri, dipotong dan / atau dipungut pihak lain SAMA BESARNYA dengan Pajak Penghasilan yang terutang menurut Undang-undang No.10 Tahun 1994.

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENGHASILAN PASAL**

N o m o r :

Masa / Tahun Pajak :

Tanggal Penerbitan :

I. Berdasarkan Pasal 17A Undang-undang No. 9 Tahun 1994 jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal

N a m a :

N P W P :

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp.
2. Pajak Penghasilan Pasal yang terutang	Rp.
3. Kredit Pajak :	
a. Setoran masa dan tahunan	Rp.
b. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.
c. S T P (Pokok Pajak)	Rp.
d. Lain-lain	Rp. _____
e. Jumlah (a + b + c + d)	Rp.
f. Dikurangi dengan kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang	Rp. _____
g. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (e - f)	Rp. _____
4. Jumlah yang masih harus dibayar (2 - 3.g)	Rp. <u> N I H I L </u>

III. Dengan demikian jumlah Pajak Penghasilan Pasal yang telah dipotong atau dipungut, disetor, dan dikompensasikan SAMA BESARNYA dengan Pajak Penghasilan Pasal yang terutang menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1994.

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
• BERI TANDA 'X' PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

IDENTITAS	NPWP			
	NAMA WAJIB PAJAK			
	JENIS USAHA			KLU :
	NO. TELEPON			NO. FAKS :
	PERIODE PEMBUKUAN	s.d.		
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)			

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	<input type="checkbox"/> DIAUDIT	OPINI AKUNTAN	<input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK			
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK			
NAMA AKUNTAN PUBLIK			
NPWP AKUNTAN PUBLIK			
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK			
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK			
NAMA KONSULTAN PAJAK			
NPWP KONSULTAN PAJAK			

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4)		RUPIAH *)
(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Tarif PPh Ps. 17 X Angka 3)	4
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	9
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	10c
	d. PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	10d
e. JUMLAH (10a + 10b + 10c + 10d)	10e	
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10e)	11
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	TGL BLN THN
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK	

(1)	(2)	RUPIAH (3)	
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif Ps. 17 X 14c)	14d	
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g	
	F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a
		b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b
G. LAMPIRAN	16 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :		
	a. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29		
	b. <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN (Wajib bagi semua Wajib Pajak)		
	c. <input type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Wajib bagi semua Wajib Pajak, bentuk formulir sesuai dengan Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	d. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	e. <input type="checkbox"/> PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)		
	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)		
	l. <input type="checkbox"/>		
	m. <input type="checkbox"/>		
n. <input type="checkbox"/>			

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. WAJIB PAJAK b. KUASA c. (Tempat) d. tgl bin thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP

PENGURUS / KUASA : e.

N P W P : f.

IDENTITAS	N P W P	
	NAMA WAJIB PAJAK	
	PERIODE PEMBUKUAN	s.d.

NO (1)	URAIAN (2)	RUPIAH (3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
	a. PEREDARAN USAHA	1a
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g
	h. JUMLAH (1d + 1g) :	1h
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
	a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.	5a
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b
	c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g
	h. SANKSI ADMINISTRASI	5h
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l
	m. JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d
	e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - <input type="text" value="7a"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

IDENTITAS	N P W P	
	NAMA WAJIB PAJAK	
	PERIODE PEMBUKUAN	s.d.

BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SPN			
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK			
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK			
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA			
5.	PENGHASILAN USAHA :			
	a. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM			
	b. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK			
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN (Yayasan / Org. Sejenis)			
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN			
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI			
	b. PERENCANA KONSTRUKSI			
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI			
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING			
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING			
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI			
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP			
13.	dst.			
JUMLAH BAGIAN A			JBA	

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a.

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	
2.	HIBAH	
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSUN	
5.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA	
6.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	
7.	dst.	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b.

Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

IDENTITAS	N P W P	
	NAMA WAJIB PAJAK	
	PERIODE PEMBUKUAN	s.d.

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
			(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
dst					
JUMLAH		JBA		100%	

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
dst			

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

- DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

IDENTITAS	N P W P	
	NAMA WAJIB PAJAK :	
	PERIODE PEMBUKUAN :	s.d.

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO (1)	NAMA DAN ALAMAT (2)	N P W P (3)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
			(Rupiah) (4)	% (5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				
JUMLAH		JBA		

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO (1)	NAMA (2)	N P W P (3)	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah) (4)	TAHUN (5)	BUNGA/TH % (6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
dst					

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO (1)	NAMA (2)	N P W P (3)	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah) (4)	TAHUN (5)	BUNGA/TH % (6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
dst					

IDENTITAS	N P W P													
	NAMA WAJIB PAJAK													
	JENIS USAHA	KLU :												
	NO. TELEPON							NO. FAKS :						
	PERIODE PEMBUKUAN							s.d.						
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)														

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	<input type="checkbox"/>	DIAUDIT	<input type="checkbox"/>	OPINI AKUNTAN	<input type="checkbox"/>	TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK						
N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK						
NAMA AKUNTAN PUBLIK						
N P W P AKUNTAN PUBLIK						
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK						
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK						
NAMA KONSULTAN PAJAK						
N P W P KONSULTAN PAJAK						

(1)		(2)	(3)
		RUPIAH *)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1.	PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1
	2.	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2
	3.	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3
B. PPh TERUTANG	4.	PPh TERUTANG (Tarif PPh Ps. 17 X Angka 3)	4
	5.	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5
	6.	JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6
C. KREDIT PAJAK	7.	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7
	8.	a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a
		b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b
		c. JUMLAH (8a + 8b)	8c
	9.	a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	9
	10.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	10a
		a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a
		b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b
		c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	10c
		d. PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	10d
	e. JUMLAH (10a + 10b + 10c + 10d)	10e	
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11.	a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10e)	11
	12.	PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	TGL
	13.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :	BLN
	a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN	THN	
	b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		

NO (1)	URAIAN (2)	RUPIAH (3)	
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		
	a. PEREDARAN USAHA	1a	
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b	
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c	
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	
	h. JUMLAH (1d + 1g) :	1h	
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2	
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3	
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4	
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :		
	a. BIAYA YANG DIBEBAHKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a	
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b	
	c. PENGgantian ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c	
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d	
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e	
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f	
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g	
	h. SANKSI ADMINISTRASI	5h	
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i	
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j	
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k	
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l	
	m. JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m	
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :		
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a	
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b	
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c	
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d	
	e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e	
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO TAHUN KE - <input type="text" value="7a"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b	
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8	

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

IDENTITAS	N P W P	
	NAMA WAJIB PAJAK	
	PERIODE PEMBUKUAN	s.d.

BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SPN			
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK			
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK			
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA			
5.	PENGHASILAN USAHA :			
	a. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM			
	b. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK			
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN (Yayasan / Org. Sejenis)			
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN			
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI			
	b. PERENCANA KONSTRUKSI			
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI			
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING			
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING			
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI			
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP			
13.	dst.			
JUMLAH BAGIAN A			JBA	

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	
2.	HIBAH	
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA Pensiun	
5.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA	
6.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	
7.	dst.	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

IDENTITAS	NPWP	
	NAMA WAJIB PAJAK	
	PERIODE PEMBUKUAN	s.d.

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO (1)	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah) (6)
			(Rupiah) (4)	% (5)	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
dst					
JUMLAH		JBA		100%	

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO (1)	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JABATAN (4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
dst			

FORMULIR

1771 - VI

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

- DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

TAHUN PAJAK

20

IDENTITAS	N P W P	
	NAMA WAJIB PAJAK	
	PERIODE PEMBUKUAN	s.d.

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
			(Rupiah)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				
JUMLAH			JBA	

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH %
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
dst					

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH %
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
dst					

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.36

Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI

TANDA TERIMA SURAT MASUK

Telah diterima surat dari FE Univ. Maranata

Nomor : 2263/FE-UKM/IV/2008

Tanggal : 11 April 2008

Perihal : Permohonan Mengadakan Penelitian/pengumpulan Data Dalam Rangka
Penyusunan Skripsi a.n. Sdr. Vera Pribadi

Tasikmalaya, 05 MAI 2008





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TASIKMALAYA

Jalan Sutisna Senjaya Nomor 151
Tasikmalaya - 46111

Telepon : 0265 - 331851 (Hunting)
Faksimile : (0265) 331852
Homepage : <http://www.pajak.go.id>

Nomor : S- 44/WPJ.09/KP.07/2008
Perihal : Pemberian izin Penelitian

Mei 2008

Yth. Dekan Universitas Kristen Maranatha
Fakultas Ekonomi
Jalan Prof drg Surya Sumantri M/TH Nomor 65
Bandung

Schubungan dengan surat Saudara Nomor : 226/FE-UKM/IV/2008 tanggal 11 April 2008 hal Permohonan Izin Penelitian dalam rangka menyusun Skripsi bagi Mahasiswa Universitas Kristen Maratha Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi atas nama *Vera Pribadi NIM 0461061* kami tidak keberatan yang bersangkutan melaksanakan penelitian pada *KPP Pratama Tasikmalaya* dengan ketentuan bahwa proses penelitian / permintaan keterangan hanya terbatas pada data yang tidak menyangkut kerahasiaan jabatan menurut Undang-undang perpajakan dan hasilnya semata-mata dipergunakan untu kepentingan ilmiah / penyusunan skripsi dan tidak untuk dipublikasikan.

Demikian untuk maklum.

Kepala Kantor e.



Kusman Manik
NIP 060061983

Tembusan :
Vera Pribadi (Mahasiswa Ybs)
Jln. Ciledug Nomor 86 Garut.

BERITA ACARA BIMBINGAN

N A M A : Vera Pribadi
 N R P / JURUSAN : 051061 / Akuntansi
 TAHUN AKADEMIK : 2008
 JUDUL SKRIPSI : ~~Peranan~~ ^{Peranan} ~~Penggunaan~~ ^{Pemeriksaan} Pajak Terhadap Wajib Pajak Penghasilan Badan PPh pasal 25 Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya)
 DOSEN PEMBIMBING : Hastutie NA, SE, Msi.
 DOSEN/Co. PEMBIMBING :

NO	HARI/TANGGAL	PEMBAHASAN	PARAF
1.	Rabu / 27 Feb 2008	Finalisasi Judul	
2.	Senin / 10 Mar '08	Revisi Judul	
3.	Kamis Rabu / 13 Mar '08	Revisi Judul	
4.	Selasa / 25 Mar '08	Revisi Judul	
5.	Rabu / 2 Apr '08	Revisi Bab 1 + 3	
6.	Kamis / 24 Apr '08	Revisi Total	
7.	Kamis / 25 Mei '08	Revisi hipotesis	
8.	Kamis / 12 Juni '08	Revisi Perangka Pemikiran	
9.	Selasa / 17 Juni '08	Acc Bab I	
10.	Selasa / 17 Juni '08	Acc Bab II	
11.	Kamis / 19 Juni '08	Bab II Revisi Bab II total	
		ejaan, istilah asing, daftar isi, daftar pust	
12.		Daftar isi Bab I, bab II, bab III	
13.	Selasa / 24 Juni '08	Acc Bab II	
13.	Kamis / 26 Juni '08	Acc Bab IV (Bawa Draft Skripsi)	
14.	Selasa / 1 Juli '08	Revisi Bab V	
	Selasa / 1 Juli '08	Revisi Abstrak	
	Selasa / 1 Juli '08	Revisi Daftar ISI	
	Selasa / 1 Juli '08	Revisi Daftar pustaka	
		Acc Bab V	
		Acc 4 abstrak, daftar isi, daftar pustaka.	

Acc 4/ sidang.

Mengetahui,
Pembantu Dekan FE-UKM

Ketua Jurusan,